

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM KANG PISMAN (KURANGI, PISAHKAN, DAN MANFAATKAN) UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG

Cipta Insan Setanggi Pekasih^{1)*}, Engkus¹⁾, Sakrim Miharja¹⁾
UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾
*Email: ciptainsan00@gmail.com**

Abstract

The purpose of this study is to examine how Collaborative Governance is interwoven in the waste management process in Bandung city, especially in Kangpisman program. This research method uses a qualitative approach with techniques in data collection using observation and also interviews with several resource persons from the Bandung City Environment Agency, the private sector, and community representatives and supported by literature studies. The results obtained by the collaboration process carried out by several parties have gone quite well, but there is still a need for evaluation and improvement of the program so that it runs more effectively and optimally because the waste problem in the city of Bandung is quite complex and requires serious handling.

Keywords: *Collaborative Governance, Waste, Waste Management*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengkaji bagaimana *Collaborative Governance* yang terjalin dalam proses tata kelola sampah di Kota Bandung khususnya dalam program Kangpisman. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik dalam pengumpulan data menggunakan observasi dan juga wawancara kepada beberapa narasumber perangkat instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, pihak swasta, dan perwakilan masyarakat serta didukung studi literatur. Hasil yang didapat proses kolaborasi yang dilakukan beberapa pihak sudah berjalan cukup baik, namun masih harus adanya evaluasi serta peningkatan program agar berjalan lebih efektif dan maksimal karena permasalahan sampah di Kota Bandung cukup kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Sampah, Tata Kelola sampah*

A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan kendala yang serius serta membutuhkan perhatian khusus. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan sampah secara nasional yang dihasilkan mencapai hingga 68 juta ton pada tahun 2020. Artinya, 270 juta orang menghasilkan sekitar 185.753-ton sampah setiap hari. Dengan kata lain, setiap penduduk menghasilkan sekitar 0,68 kg sampah per hari, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 saja, jumlah sampah yang dihasilkan secara nasional mencapai 64 juta ton yang dihasilkan oleh 267 juta orang. Pada akhirnya, sampah ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (Rizaty, 2021)

Sampah adalah sisa-sisa produk maupun benda yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi tetapi dapat didaur ulang menjadi barang yang berharga. Sampah berada disemua tahap materi, termasuk gas, cairan, dan padat. Residu yang dihasilkan selama tahap terakhir, terutama gas,

ARTIKEL

disebut juga sebagai emisi. Emisi sering dikaitkan dengan polusi. Melalui kegiatan industri (juga disebut limbah) seperti pertambangan, manufaktur, dan konsumsi, sejumlah besar limbah dihasilkan dalam kehidupan manusia. Hampir semua produk industri menjadi limbah sekaligus, dan jumlah limbahnya hampir sama dengan jumlah yang dikonsumsi. (Octavianus, 2009)

Pengelolaan sampah adalah permasalahan lingkungan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi semua aktor yang berperan serta dalam proses pengelolaan sampah harus dilibatkan. Sampah adalah masalah yang rumit dan perlu ditangani secara bersama-sama, terutama di negara berkembang. Masalah sampah di negara-negara tersebut semakin meningkat setiap tahunnya.

Pengelolaan dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dirancang untuk menggunakan bahan atau objek untuk tujuan tertentu, yang membutuhkan sumber daya dan prosedur untuk melakukannya (Muksin & Engkus, 2020) Pengelolaan sampah merupakan aktivitas yang terstruktur, kompleks serta berkelanjutan mencakup pengurangan dan tata kelola sampah. (UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah) dalam melakukan pendistribusian sampah biasa dilakukan dengan mengumpulkan sampah dari wilayah pemukiman atau dari beberapa sumber, kemudian diangkut untuk ditempatkan di Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya diproses pada pembuangan akhir. Volume sampah yang besar, tempat pembuangan akhir yang terbatas, pelayanan yang buruk, pembiayaan dan fasilitas yang kurang layak, dan kualitas kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi alasan utama yang menyebabkan permasalahan ini menjadi hal yang perlu dibenahi agar tidak menimbulkan masalah baru seperti pencemaran air, udara, dan tanah yang tentunya sangat merugikan. (Egsaugm, 2019)

Hingga saat ini pengelolaan sampah dengan menggunakan tata cara pengelolaan sampah yang ramah lingkungan belum banyak dilakukan. Sebagian besar sampah TPA di Indonesia dikelola dengan tata cara pembuangan terbuka serta pemusnahan, tetapi ada tata cara lain seperti daur ulang, pemilahan, dan pengomposan, tidak banyak digunakan. Tata cara pembuangan secara terbuka merupakan cara yang paling sering digunakan, sampah hanya dibuang di tempat pembuangan akhir tanpa pengolahan lebih lanjut, selain itu tata cara secara pemusnahan adalah perataan dan pemadatan sampah memakai alat berat yang selanjutnya ditutup dengan tanah. Pencemaran udara, air dan tanah sangat berpotensi terjadi jika terus menggunakan kedua metode tersebut. (Winahyu et al., 2019)

Tabel 1. Jumlah Produksi Sampah di Tiap Kecamatan Kota Bandung

No	Kecamatan	Jumlah Produksi	Satuan	Tahun
1	Bandung Kulon	102.323,20	Kilogram Per hari	2020
2	Babakan Ciparay	107.830,10	Kilogram Per hari	2020
3	Bojongloa Kaler	78.677,90	Kilogram Per hari	2020
4	Bojongloa Kidul	60.734,10	Kilogram Per hari	2020
5	Astana Anyar	43.304,80	Kilogram Per hari	2020
6	Regol	55.449,80	Kilogram Per hari	2020
7	Lengkong	45.553,20	Kilogram Per hari	2020
8	Bandung Kidul	50.298,50	Kilogram Per hari	2020
9	Buah Batu	72.882,60	Kilogram Per hari	2020
10	Rancasari	57.383,20	Kilogram Per hari	2020
11	Gedebage	27.291,60	Kilogram Per hari	2020

ARTIKEL

12	Cibiru	59.900,20	Kilogram Per hari	2020
13	Panyileukan	33.747,70	Kilogram Per hari	2020
14	Ujung Berung	60.979,10	Kilogram Per hari	2020
15	Cinambo	19.858,30	Kilogram Per hari	2020
16	Arcamanik	46.275,60	Kilogram Per hari	2020
17	Antapani	65.965,90	Kilogram Per hari	2020
18	Mandalajati	55.080,90	Kilogram Per hari	2020
19	Kiaracondong	88.390,40	Kilogram Per hari	2020
20	Batununggal	76.454,70	Kilogram Per hari	2020
21	Sumur Bandung	22.281,20	Kilogram Per hari	2020
22	Andir	60.553,50	Kilogram Per hari	2020
23	Cicendo	69.611,50	Kilogram Per hari	2020
24	Bandung Wetan	19.612,60	Kilogram Per hari	2020
25	Cibeunying Kidul	67.583,60	Kilogram Per hari	2020
26	Cibeunying Kaler	45.007,20	Kilogram Per hari	2020
27	Coblong	128.342,20	Kilogram Per hari	2020
28	Sukajadi	74.587,10	Kilogram Per hari	2020
29	Sukasari	56.004,90	Kilogram Per hari	2020
30	Cidadap	43.610,70	Kilogram Per hari	2020

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, 2022)

Seperti yang terlihat pada Tabel 1. jumlah produksi sampah yang ada di tiap kecamatan Kota Bandung cukup banyak. Pengurangan serta pengolahan sampah yang belum optimal berpotensi meningkatkan produksi sampah seiring dengan pertumbuhan populasi. Menurut Asep sebagai Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat (dalam Sinaga, 2020) Selain mengurangi produksi sampah, pengolahan sampah juga harus dioptimalkan. Adapun caranya adalah dengan memanfaatkan sampah melalui bank sampah. Ada sekitar 1.600 bank sampah di Jawa Barat. Namun, banyak yang tinggal nama dan tidak beroperasi. Adapun, pengelola bank sampah belum memahami tata kelola sampah. Selain itu, sebagian besar pengelola adalah relawan yang tidak memiliki dukungan pemerintah, yang seringkali membuat program terhenti.

Kota Bandung terletak di Jawa Barat serta merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Saat ini Kota Bandung memiliki luas 167,3 km² dan memiliki wilayah administrasi yang terdiri dari 153 kelurahan, 30 kecamatan, 9.473 RT dan 1.531 RW. Salah satu persoalan yang terjadi di Kota Bandung saat ini ialah sampah yang tidak sepenuhnya tertangani.

Tabel 2. Jumlah Timbulan Sampah di Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah Sampah (Ton)	Kapasitas Pengangkutan (Ton)	Sisa Jumlah Sampah (Ton)
1	2016	335,884	278,780	57,104
2	2017	777,405	621,924	155,481

ARTIKEL

3	2018	790,199	632,169	158,030
4	2019	584.574	467.659	116.915
5	2020	569,600	483.092	86,508

(Sumber: PD Kebersihan Kota Bandung, 2020)

Berdasarkan tabel di atas dengan jelas menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah sampah yang diangkut dengan daya dukungnya. Akibatnya, masih ada sampah yang tidak dapat diangkut yang menjadi persoalan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung setiap tahunnya. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, sampah Kota Bandung pada tahun 2018 menghasilkan 1.599,93-meter kubik (m³) atau 1.600,02 ton per hari, berdasarkan data Kota Bandung Rincian, sisa makanan 712,17 m³, kayu, ranting, daun 63,70 m³, plastik 298,72 m³. Sisanya adalah logam, karet, kulit, B3, dll. Adapun sumber-sumber sampah yang paling banyak yaitu dari pemukiman rumah tangga 1.048,90 ton, dari pasar 300 ton, dan sisanya adalah dari perkantoran, ruang komersial, dan fasilitas umum lainnya.

Total sampah masih meningkat, namun trennya dikatakan menurun. Pada tahun 2019 menurun dari 16,87% menjadi 3,96% dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020, jumlah sampah menurun sebesar 0,47% pada tahun 2019. Di sisi lain, menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung berdasarkan data. Total produksi sampah Kota Bandung pada tahun 2020 adalah 1.735,99m³ per hari. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga membandingkan data yang dirilis Pemkot Bandung dengan DLH Kota Bandung, kisaran sampah yang diproduksi Kota Bandung masih berada pada kisaran 1.500 ton per hari. Belum ada perubahan yang signifikan.

Penumpukan sampah di Kota Bandung pada tiap tahunnya semakin melambung. Rata-rata timbunan sampah di Kota Bandung adalah sebesar 1.500-1.600 ton pada setiap harinya. Sedangkan untuk permasalahan sampah, Kota Bandung mempunyai 160 Tempat Pembuangan Sementara yang terpecah di Kota Bandung, akan tetapi masih belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir tetap, yang menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung turut serta saat pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti yang lokasinya berada di Kecamatan Cipatat Desa Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, sudah aktif sejak 2006 serta memiliki luas tanah 25 hektar.

Banjir sering terjadi diberbagai wilayah Kota Bandung. Hal ini terkait dengan peningkatan timbulan sampah, namun tidak ada pengelolaan sampah yang tepat. Maka dari itu, pemerintah Kota Bandung perlu menambah efisiensi pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dipimpin oleh pemerintah kota bertujuan untuk membantu masyarakat mengelola sampah yang mereka hasilkan sendiri. Berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap pemeliharaan kesehatan masyarakat dan penciptaan lingkungan yang sehat. (Trisakti et al., 2020)

Pemerintah Kota Bandung sendiri dalam proses menanggulangi permasalahan sampah telah membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung, akan tetapi dalam penerapan ternyata belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Walikota Bandung Oded M Danial dan Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana pada tahun 2018 membuat program Kangpisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) yang menjadi alternatif dalam menangani permasalahan sampah di Kota Bandung. Program ini berprinsip Collaborative Governance yang dimana pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat, pihak swasta maupun organisasi yang terjun dalam bidang lingkungan pengelolaan sampah.

Berkaitan dengan kegiatan Kang pisman, Pemerintah Kota Bandung merilis Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Bandung Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya. Langkah yang wajib diikuti dalam program Kangpisman adalah: Kang (Kurangi), merupakan proses mengurangi seluruh hal yang berdasar plastik untuk digunakan dan juga sulit terurai oleh alam. Contohnya air mineral kemasan, plastik-plastik, botol, dan sebagainya. Solusi yang dapat dilalukan adalah gunakan produk-produk yang dapat digunakan secara berulang-ulang misalnya tas plastik diganti tas kanvas, dan usahakan produk tersebut ramah lingkungan. Pis (Pisahkan), merupakan proses memisahkan jenis sampah organik dan anorganik. Man (manfaatkan) merupakan proses mendaur ulang sampah yang tadinya tidak bernilai menjadi memiliki nilai guna. (Sekarningrum et al., 2020)

Program Kang Pisman pada dasarnya menggunakan prinsip zero waste berbasis daur ulang. Hilangkan sampah dari sumbernya dengan memilah, membuat kompos, dan mengumpulkan barang-barang yang dapat dijual. Penggunaan kembali, meminimalisasi dan daur ulang sangat dibutuhkan untuk mengurangi pencemaran tempat pembuangan akhir (TPA) dan lingkungan oleh timbulan sampah.

Menurut Uung Tanuwidjaja Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung (dalam Putra, 2021) mengatakan bahwa program Kang pisman ini belum berjalan secara maksimal. Dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih kurang, serta belum adanya proses penegakan hukum bagi pelanggar pembuang sampah, menurutnya harus ada hukuman yang lebih digalakan agar masyarakat sungkan dan memiliki efek jera dan tidak membuang sampah sembarangan.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi awal program Kang Pisman kepada masyarakat dilakukan di empat kelurahan yaitu, Kelurahan Babakan Penghulu, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kelurahan Pakemitan. Melalui pelaksana kegiatan yaitu kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menjadi penggagas dalam proses pengelolaan sampah di daerah tersebut. Program Kang Pisman disosialisasikan melalui metode penyuluhan yang menyajikan teori tentang permasalahan sampah di Kota Bandung, solusi penanggulangan sampah, implementasi kegiatan Kang Pisman, proses tata kelola sampah organik dan anorganik, pembagian kerja, rencana kerja, pemangku kepentingan, dan manfaat pengelolaan sampah. Selain itu, kegiatan edukasi dilakukan dalam bentuk aksi5 langsung antara lain praktik pemilahan sampah anorganik, pembuatan Mikro Organisme Lokal, pengolahan sampah organik, praktik urban farming, membuat kerajinan tangan dari daur ulang sampah, edukasi pintu ke pintu, dan pengambilan sampah organik dengan cara door-to-door. Kegiatan edukasi dan sosialisasi program Kang Pisman ini telah memberikan manfaat baik kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, walaupun masih ada masyarakat yang kurang memahami sosialisasi dan edukasi ini. (Sekarningrum et al., 2020)

Mengingat pengelolaan sampah merupakan masalah yang perlu ditangani dan menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat, prinsip-prinsip tata kelola kolaborasi harus diterapkan mengingat masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah. Definisi disampaikan oleh Balogh (dalam Febrian, 2016) bahwa Collaborative governance adalah suatu proses dalam pengelolaan serta perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor konstruktif dari berbagai tingkatan, baik pada instansi pemerintah dan/atau publik, organisasi swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan publik. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan judul pembahasan “Collaborative Governance dalam Program Kang Pisman Untuk Mengatasi Permasalahan Sampah di Kota Bandung” Dengan

tujuan menganalisis apakah program Kang Pisman yang dibuat oleh Walikota Bandung telah berjalan optimal atau belum sesuai dengan prinsip Collaborative Governance.

B. KAJIAN PUSTAKA

Collaborative governance terbentuk sejalan dengan pergeseran paradigma *governance* dari *government* ke *governance*. Dalam konsep *governance*, pemerintah tidak harus menuntaskan urusan publik sendiri, tetapi dapat menyertakan partisipasi berbagai pihak atau lembaga masyarakat untuk mengembangkan kualitas pelayanan dengan sarana publik. Selain persyaratan dan persoalan yang semakin kompleks, masyarakat juga harus dilibatkan dalam kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, terdapat proses tata kelola kolaborasi untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta upaya dan tanggapan pemerintah dalam menangani isu- isu publik. Melibatkan sektor publik dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan akan membuat sektor publik lebih efektif dan efisien.

Collaborative Governance adalah kondisi bagi pemerintah untuk mencapai tujuan publik melalui suatu kerjasama antara kelompok maupun individu. *Collaborative Governance* juga dapat memperlihatkan keadaan saling keterkaitan antar para pihak. Maksud untuk menerapkan *Collaborative Governance* bermula dari kenyataan bahwa para pihak yang terlibat menyadari keterbatasan mereka. Aktor kemudian harus mengungkapkan keinginan dan kemauan untuk membentuk hubungan yang lebih dekat dengan aktor lain. *Collaborative Governance* merupakan upaya dan respon pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik yang masih belum bisa teratasi dengan baik.

Penelitian ini menggunakan teori dari (Ansell & Gash, 2008) yang menginterpretasikan *Collaborative Governance* sebagai mekanisme untuk mengatur satu atau lebih entitas pemerintah yang berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berbasis konsensus, dan berbasis diskusi yang ditujukan untuk pengembangan atau implementasi kebijakan, program, atau aset publik. Ansell dan Gash mengungkapkan indikator dalam proses melaksanakan kolaborasi yaitu: Dialog tatap muka antar aktor (*face-to-face*), Membentuk kepercayaan (*trust building*), Proses dalam mencapai komitmen (*commitment to process*), Pemahaman dalam keputusan bersama (*share understanding*), dan Memperoleh hasil sementara (*Intermediate outcomes*).

Pada penelitian terdahulu tentang penerapan *Collaborative Governance* oleh (Qalby, 2018) yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)” Penelitian ini menjelaskan penerapan *Collaborative Governance* dalam proses pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang berorientasi pada Bank sampah Pusat. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar telah berlangsung serta mempunyai manfaat dalam proses inovasi berjalan, hal tersebut dapat dilihat melalui banyaknya konsumen pada bank sampah, namun dalam pencapaian inovasi kurang efektif. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel penelitian yaitu *collaborative governance* dengan penelitian kualitatif. Perbedaan atau *Novelty* kajian yang dilakukan peneliti yakni lebih memfokuskan bagaimana prinsip *collaborative governance* dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandung.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh (Fauziah, 2018) yang berjudul “Analisis *Collaborative*

ARTIKEL

Governance dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bandung” Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dan faktor penghambat kolaborasi dalam peningkatan pengelolaan bank sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan bank sampah masih belum berhasil karena terdapat beberapa faktor yang belum optimal, faktor-faktor tersebut antara lain komunikasi, pengambilan keputusan secara musyawarah, tujuan, kepemimpinan, kepemimpinan, *resource sharing* dan modal sosial pada isu-isu kepercayaan. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel penelitian yaitu *collaborative governance* dengan penelitian kualitatif. Perbedaan atau Novelty kajian yang dilakukan peneliti yakni lebih memfokuskan bagaimana prinsip *collaborative governance* dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandung.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013 :15) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami, tentang yang sebenarnya terjadi di lapangan studi.(Nugrahani, 2014)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. (1) Observasi : Menurut (Engkus, Suparman & Sulistia, 2019) Observasi dilakukan untuk mencari data dan informasi secara sistematis tentang gejala dan fenomena (peristiwa atau kejadian) berdasarkan tujuan penelitian yang telah diformalkan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua kejadian. Metode ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan fakta di lapangan. (2) Wawancara: Menurut (Sugiyono, 2015) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan masalah untuk diteliti dan ketika peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam dari responden. (3) Dokumentasi : Menurut (Sugiyono, 2015) Dokumentasi adalah suatu metode penggalan data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, angka tertulis, dan gambar berupa laporan dan informasi yang berguna untuk penelitian.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan/Jabatan	Jumlah
1	LTF	Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	1
2	AND	Sekretariat Forum Bandung Juara Bebas Sampah	1
3	TNI	Ketua Generasi Semangat Selalu Ikhlas	1
4	HMN	Ketua RW Desa Cibunut Kota Bandung	1

(Sumber :Diolah Peneliti, 2022)

Berdasarkan Tabel di atas Informan berjumlah 4 orang. Informan tersebut diantaranya sebagai berikut: Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menjadi Informan kunci. Informan selanjutnya Perwakilan Pihak Swasta yang berkolaborasi dengan Kang Pisman menjadi Informan Utama. dan Informan berikutnya Perwakilan Masyarakat umum Kota Bandung menjadi Informan Pendukung. Dalam pemilihan informan digunakan teknik yaitu dengan *Purposive Sampling* terhadap informan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan kepada Pihak Swasta yang

berkolaborasi dengan Kang Pisman.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa data langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh peneliti melalui penelitian yang berhubungan dengan literatur, internet, jurnal, dan buku. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori (Milles dan Huberman, 1992) X yang menyebutkan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data, merupakan suatu bentuk analisis yang menyaring, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan dikonfirmasi..
2. Penyajian Data, merupakan deretan informasi organisasi yang memungkinkan penelitian buat menarik konklusi. Penyajian data dibuat untuk menemukan pola yang bermakna serta menaruh kesempatan untuk menarik konklusi dan menyarankan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan, merupakan temuan yang berupa deskripsi sesuai objek yang berbentuk sementara atau akan berkembang dengan wujud hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialog Antar Muka (*Face-to-face*)

Proses dalam *collaborative governance* menurut (Ansell & Gash, 2008) bermula dengan proses dialog tatap muka antar pemangku kepentingan . Hal ini dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Seluruh tata kelola kolaboratif didasarkan pada dialog tatap muka. Sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk saling menguntungkan. Tetapi, dialog tatap muka lebih dari sekedar alat tawar-menawar.

Proses dialog antar muka sudah berlangsung dan berjalan dengan cukup baik, ditunjukkan dengan pertemuan secara formal maupun informal, baik secara langsung ataupun dengan menggunakan media digital, terlebih pada saat masa pandemi. Pertemuan dilakukan bersama beberapa pihak yang terlibat yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai perwakilan pemerintah, kemudian ada pihak swasta dan ada juga perwakilan dari masyarakatnya itu sendiri.

Dalam proses dialog antar muka ini terdapat proses sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai program Kangpisman ini yang bertujuan untuk pengelolaa sampah di Kota Bandung. Proses sosialisai dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai fasilitator dan membentuk tim pendamping yang diterjukan ke beberapa wilayah Kawasan Bebas Sampah (KBS), untuk saat ini ada beberapa wilayah yang menjadi role model Kawasan Bebas Sampah yaitu: 1.Kelurahan Sukamiskin, 2.Kelurahan Sukaluyu, 3.Kelurahan Gempolsari, 4.Kelurahan Cihaurgeulis, 5.Kawasan Kujangsari, 6.Kelurahan Neglasari, 7.Kelurahan Babakansari, 8.Kebon Pisang.

Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membentuk sebuah kepercayaan adalah hal yang penting dalam proses *Collaborative Governance*, yang memiliki arti semua pihak memang mempunyai niatan yang sama dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan agar terhindar dari adanya konflik maupun kesalahpahaman. Dalam membentuk sebuah kepercayaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

berupaya dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak misalnya dengan dengan Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS) dan Generasi Semangat Selalu Ikhlas (GSSI) yang berfokus pada isu lingkungan khususnya pada pengelolaan sampah. Kolaborasi tersebut dengan membentuk forum diskusi.

Forum diskusi tersebut dilakukan dalam waktu sebulan sekali atau tiga bulan sekali, yang dihadiri oleh beberapa aktor pengelolaan sampah misalnya akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, birokrat, serta pelaksana wilayah Kawasan Bebas Sampah. Hal tersebut bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yakni 1. Kekuatan, 2. Kelemahan, serta 3. Ancaman. Dalam forum tersebut beberapa pihak yang terlibat memaparkan perkembangan serta kendala yang dihadapi oleh wilayahnya dalam menjalankan Kawasan Bebas Sampah Program Kang Pisman. Kemudian secara bersama-sama dianalisis dan dilakukan evaluasi serta monitoring.

Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Procces*)

Komitmen adalah sebuah bentuk kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mempunyai tanggung jawab yang sama antar *stakeholder* merupakan inisiatif yang penting, para pemangku kepentingan tersebut harus sadar akan tugas yang menjadi bagiannya dan bertanggung jawab atas tugas tersebut. Pemangku kepentingan dituntut aktif ikut serta dalam setiap kegiatan yang akan datang secara berkelanjutan.

Komitmen yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung ketika menangani sampah di Kota Bandung adalah dengan cara melakukan pendampingan di beberapa wilayah yang sudah melaksanakan Kawasan Bebas Sampah program Kang pisman, selain itu diberikan juga sarana dan prasana pendukung seperti ember sampah untuk mengumpulkan sampah organik, kemudian ada gerobak untuk menangkut sampah, kemudian membentuk Bank Sampah yang bertujuan untuk mengelola sampah anorganiknya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung juga membuat kebijakan pengangkutan sampah yang terjadwal pada setiap hari selasa-kamis, yang diangkut hanya sampah anorganik. Dan senin-rabu-jumat hanya sampah organik. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA Sarimukti karena statusnya sudah overload. Diharapkan dengan jadwal tersebut, masyarakat mau untuk memilah serta mengolah sampahnya.

Selain itu para pihak yang berkolaborasi juga sangat berkomitmen dengan sungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandung ini, misalnya membuat forum diskusi antar pelaku persampahan, mengedukasi masyarakat serta perusahaan dan wilayah pendidikan seperti sekolah-sekolah, membuat event tentang pentingnya mengelola sampah, dan sebagainya. Komitmen yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sesuai dengan teori yang dipakai oleh (Ansell & Gash, 2008) yaitu komitmen pemangku kepentingan terlibat mempunyai tanggung jawab bersama atas prosesnya dan sudah disepakati bersama dalam berdiskusi.

Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)

Berbagi pemahaman bahwa kegiatan atau konservasi ini adalah untuk kebaikan bersama dan tanggung jawab bersama, mengidentifikasi masalah untuk pemahaman bersama antar kelompok, dan mengenali nilai-nilai inti yang mendasari kegiatan yang dilakukan bersama. Memberikan pengertian, artinya misi dan tujuan yang terarah dengan baik untuk kerjasama selanjutnya. Pemahaman bersama memberikan tujuan dan masalah yang menantang kesinambungan proses kolaboratif.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menerangkan bahwa Pengelolaan sampah saat ini dilandaskan pada UU No 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah No 09 tahun 2018 dengan fokus utama yaitu penanganan dan pengurangan sampah. UU dan PP tersebut disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu mengerti

bagaimana pentingnya tata kelola sampah yang baik, kemudian dapat menjalankannya dari rumah masing-masing. Pemahaman yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sesuai dengan teori (Ansell & Gash, 2008) yaitu pemahaman bersama adalah tujuan bersama, misi bersama, dan tujuan serta arah yang baik.

Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*)

Hasil sementara merupakan apa yang dihasilkan dari kegiatan kolaborasi pada tahap awal harus menunjukkan hasil yang dapat dikembalikan atau digunakan sebagai modal pada kegiatan kolaborasi selanjutnya agar kegiatan kolaborasi dapat berkelanjutan dan tidak terhenti pada tahap awal. Hasil dari kolaborasi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta para aktor yang berkepentingan. Kepuasan masyarakat dalam pengelolaan sampah memberikan efek yang positif bagi proses kolaborasi. (Ansell & Gash, 2008) memberikan tolak ukur yang merupakan dampak yang dimaksudkan sebagai penentu keberhasilan pemimpin dalam kolaborasi.

Hasil dari kolaborasi Kang Pisman sudah cukup dirasakan manfaatnya dengan baik oleh masyarakat melalui beberapa program seperti Kawasan Bebas Sampah, Bank Sampah, *Waste to Food*, *Zerosima*. Masyarakat pun sudah mulai paham dengan mengelola sampahnya secara mandiri dapat mendatangkan manfaat-manfaat yang positif. Selain menjadikan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan terhindar dari banyaknya penyakit. Kemudian juga masyarakat bisa mendapatkan pemasukan tambahan dari menjual atau menabung sampah anorganiknya ke Bank Sampah.

Kang pisman merupakan program yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang sangat baik dalam tujuan untuk mengelola sampah di Kota Bandung, namun secara keseluruhan belum optimal karena menurut data bahwa masih banyak wilayah-wilayah di Kota Bandung yang belum menerapkan prinsip Kang pisman ini, ada 180 RW dari 94 Kelurahan dan 30 Kecamatan yang baru menerapkan program Kawasan Bebas Sampah. Sedangkan di Kota Bandung ada 1531 RW, 153 Kelurahan, 30 Kecamatan hal tersebut membuktikan bahwa belum optimalnya program Kangpisman walaupun secara tujuan sudah sangat baik dan harus tetap ada dan dilanjutkan.

Faktor-faktor Penghambat *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandung

1. Financial

Anggaran merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah kegiatan agar setiap prosesnya dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam program Kangpisman ini adalah masih banyaknya warga yang menjalankan program Kangpisman secara suka rela, belum optimalnya pembiayaan dan anggaran yang diberikan oleh PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan) membuat beberapa wilayah ada yang bisa membantu dan ada yang tidak.

Harus adanya kepastian pendaan dan mekanisme yang baik dari PIPPK tersebut untuk program Kangpisman, agar masyarakat tidak kesulitan perihal pembiayaan dan dapat menjalankan Kangpisman dengan baik. Harmonisasi dan koherensi antar kebijakan harus sepadan dengan anggaran yang diterima. Anggaran yang besar dan kebijakan yang diterapkan akan membuat kemitraan berhasil, tetapi jika anggarannya lebih kecil maka tingkat keberhasilannya pun kecil.

2. Kesadaran Masyarakat

Situasi Krisis sangatlah mengkhawatirkan dalam tata kelola sampah di Kota Bandung.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah pada tempatnya merupakan hal yang mengkhawatirkan dalam proses kolaboratif. Berdasarkan teori (Ansell & Gash, 2008) *stakeholder* dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung harus mempunyai kapasitas dan kekuatan dalam bernegosiasi. Menurut salah satu informan dari wakil masyarakat menyebutkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum pahan mengenai pentingnya merawat lingkungan. Terlihat masih adanya penumpukan sampah di Kota Bandung walaupun tidak sebanyak sebelum adanya Kangpisman. Kendala lainnya yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya yang belum mencukupi sehingga menyebabkan pengangkutan sampah menjadi terhambat. Hal tersebut harus dibenahi permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut akan lebih cepat teratasi.

3. Kepentingan Politik

Keberhasilan dalam proses kolaborasi tidak terlepas dari para *stakeholder* yang berkomitmen dan bertanggung jawab secara penuh atas apa yang ditujukan. Setiap kewilayahan memiliki fokus pentingnya masing-masing, dan masih banyak juga kepala wilayahnya yang masih belum mensosialisasikan dan menjalankan program Kangpisman ini secara baik. Tujuan penerapan *Collaborative Governance* yaitu agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik dan dapat mengurangi dampak lingkungan. Tetapi terdapat beberapa hambatan menyebabkan pertimbangan untuk membuat harapan. Hasil wawancara terhadap informan wakil masyarakat menjelaskan bahwa harapan masyarakat kepada pemerintah daerah yakni agar dapat mengoptimalkan petugas yang ada sebagai fasilitator, sarana dan prasarana harus ditingkatkan, dan juga alokasi dana dengan mekanisme yang jelas. Tujuan merupakan hal yang harus dicapai dalam kolaborasi, tujuan dari kolaborasi Kangpisman ini adalah memaksimalkan sumber daya manusia serta sarana adalah hal yang paling penting dalam meningkatkan penanganan sampah di Kota Bandung.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa program Kangpisman perspektif *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal dengan penjelasan sebagai berikut: *Face to Face*: dalam proses ini sudah berjalan cukup baik, dengan hadirnya forum-forum diskusi antar stakeholder yang terlibat yaitu pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat itu sendiri. Forum diskusi dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi serta evaluasi program Kangpisman. *Trust Building*: dalam proses ini pihak pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak swasta yang bertujuan untuk membantu jalannya program Kangpisman terkait penanganan sampah di Kota Bandung serta membantu dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. *Commitment to Procces*: dalam proses ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung membuat komitmen yaitu dengan cara melakukan pendampingan secara langsung kewilayah yang sudah menjalankan Kawasan Bebas Sampah hal tersebut bertujuan agar seluruh proses pengelolaan sampah dapat berjalan baik dan sesuai prosedur. *Share Understanding*: dalam proses ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menerangkan bahwa Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan UU No 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah No 09 tahun 2018 dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat lebih paham terkait pengelolaan sampah. *Intermediate Outcomes*: Dalam proses ini hasil sementara yang didapat dalam kolaborasi ini adalah program-program seperti *Zerosima*, Kawasan Bebas Sampah, Bank Sampah, *Waste to Food*. Masyarakat juga sudah paham bagaimana cara mengelola sampah dengan baik sehingga menjadi feedback yang positif terhadap lingkungan. Program Kangpisman sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal karena masih banyak wilayah di Kota Bandung yang belum

ARTIKEL

mau menjalankan Kawasan Bebas Sampah ini. Faktor Penghambat: Masih terbatasnya pengalokasian dana menjadi faktor yang menghambat proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung. Kemudian masih banyaknya masyarakat yang belum diberikan pemahaman mengenai pengelolaan sampah serta sosialisasi yang dilakukan masih minim.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Egsaugm. (2019). *Sejauh Manakah Inovasi Pengelolaan Sampah di Indonesia?* Egsaugm. <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2019/10/19/sejauh-manakah-inovasi-pengelolaan-sampah-di-indonesia/>
- Engkus, Suparman, N., & Sulistia, D. F. (2019). Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian Di Daerah Koperasi sebagai sokoguru dan Masalah Lemahnya kesadaran Lemahnya partisipasi Lemahnya kedisiplinan Lemahnya jiwa kewirausahaan Lemahnya keterampilan Lemah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 58–70.
- Fauziah, H. (2018). *Analisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kabupaten Bandung*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Wedana*, 2(1).
- Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Muksin, M., & Engkus, E. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Tata Kelola Sampah Di Kabupaten Sumedang. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.15575/jim.v1i1.8287>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Octavianus, B. (2009). Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Pusat Pengelolaan Sampah Diy. In *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Putra, W. (2021). *3 Tahun Berjalan, Program Kang Pisman Belum Berhasil Atasi Sampah Bandung*. Detik News. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5740321/3-tahun-berjalan-program-kang-pisman-belum-berhasil-atasi-sampah-bandung>
- Qalby, N. A. (2018). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rizaty, M. (2021). *Komposisi Sampah Nasional Berdasarkan Sumber Sampah (2020)*. Databoks.

ARTIKEL

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/mayoritas-sampah-nasional-dari-aktivitas-rumah-tangga-pada-2020#:~:text=Indonesia menghasilkan 67%2C8 juta,9%25 sampah berasal dari kawasan.>

Sekarningrum, B., Sugandi, Y. S., & Yunita, D. (2020). Sosialisasi dan Edukasi Kangpisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah). *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.25244>

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In *Alfabeta*.

Trisakti, F., Anwar, H. S., Lestary, F. P., & Engkus. (2020). Analisis Kinerja Pelayanan Tata Kelola Sampah Di Kabupaten Bandung. *SELL Journal*, 5(1), 55.

Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaikat, Y. (2019). Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2), 1–17. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24626